



9 772088 235001

TANTANGAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH DALAM MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN DI INDONESIA

Farhan Ryandi*

Abstrak

Di Indonesia, terdapat sekitar 3,9 juta anak tidak sekolah karena berbagai alasan, salah satunya jarak ke sekolah yang jauh. Oleh sebab itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan program pendidikan jarak jauh (PJJ) jenjang pendidikan menengah yang proyek uji terapnya berlokasi di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Malaysia. Salah satu target penerima program ini adalah anak yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kemendikdasmen juga telah merancang peta jalan penerapan PJJ untuk tahun 2025 hingga 2029. Namun, untuk merealisasikan program tersebut terdapat tantangan-tantangan yang perlu diantisipasi. Tulisan ini akan menjelaskan rancangan program PJJ Kemendikdasmen dan memetakan tantangan yang dapat muncul di kemudian hari, serta alternatif-alternatif yang dapat dilakukan. Komisi X DPR RI, melalui fungsi pengawasan, diharapkan dapat memastikan perencanaan program dan anggaran PJJ dikaji secara matang agar tepat sasaran, efisien, dan layak diterapkan. Keberhasilan program ini juga menuntut komitmen politik, dukungan anggaran, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Pendahuluan

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Tatang Muttaqin, menyampaikan bahwa jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia mencapai sekitar 3,9 juta. Sekitar 25 persen di antaranya memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan karena berbagai alasan, antara lain keterbatasan biaya, keharusan bekerja atau mencari nafkah, pernikahan atau tanggung jawab rumah tangga, serta jarak rumah ke sekolah yang jauh. Meskipun data menunjukkan jumlah ATS menurun setiap tahun, angka tersebut tetap signifikan dan memerlukan perhatian serius (Kemendikdasmen, 2025).

Selain itu, jumlah ATS terbesar berasal dari anak-anak pada jenjang pendidikan menengah dibandingkan jenjang lainnya (Larasati, 2025). Untuk menjawab persoalan tersebut, Kemendikdasmen meluncurkan pilot project (uji terap) pendidikan jarak jauh (PJJ) pada jenjang pendidikan menengah. Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan akses pendidikan bermutu bagi semua kalangan, sekaligus menurunkan jumlah ATS di Indonesia. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudin, mengapresiasi langkah Kemendikdasmen tersebut. Program ini telah dinantikan anak-anak

*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: farhan.ryandi@dpr.go.id

di wilayah perbatasan sejak dua dekade lalu (Rosa, 2025). Tulisan ini akan menjabarkan rancangan program PJJ Kemendikdasmen, menganalisis tantangan yang berpotensi muncul, serta menawarkan alternatif solusi untuk memperkuat implementasinya.

Uji Terap PJJ Jenjang Pendidikan Menengah

Pada Kamis, 7 Agustus 2025, Kemendikdasmen meluncurkan uji terap PJJ pada jenjang pendidikan menengah. Uji terap ini dilaksanakan di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia, dengan target sekitar 100 (seratus) siswa peserta PJJ. Pemilihan SIKK sebagai lokasi proyek percontohan didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, SIKK merupakan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dengan jumlah siswa terbanyak. Kedua, SIKK telah menyelenggarakan program Sekolah Menengah Atas (SMA) Terbuka. Ketiga, SIKK memiliki tempat kegiatan belajar (TKB) atau *community learning center* (CLC) di berbagai lokasi di Sabah dan Serawak (Rosa, 2025).

Sebagai SMA Terbuka, SIKK sudah memiliki infrastruktur dan pengalaman dalam penyelenggaraan PJJ. Selain itu, SIKK dianggap merepresentasikan wilayah 3T karena melayani siswa yang tinggal di daerah perkebunan sawit di Sabah dan Serawak. Dengan demikian, SIKK dinilai tepat menjadi model pelaksanaan PJJ yang inklusif dan mampu menjawab kendala akses pendidikan. Pada proyek ini, SIKK berkolaborasi dengan Universitas Terbuka (UT) dan SMA Negeri 2 Padalarang. UT, sebagai perguruan tinggi terbuka yang telah lama menerapkan PJJ, menyediakan sistem pembelajaran yang digunakan dalam program ini. Sementara itu, SMA Negeri 2 Padalarang memberikan pendampingan karena telah memiliki pengalaman dalam menjalankan model SMA Terbuka (Rosa, 2025).

Target Penerima dan Peta Jalan PJJ Indonesia

Pada proyek percontohan ini, Kemendikdasmen menargetkan PJJ jenjang pendidikan menengah di SIKK melayani sekitar 100 siswa. Secara lebih luas, sasaran PJJ di Indonesia mencakup tiga kelompok utama. Pertama, anak-anak yang tinggal di wilayah 3T. Kedua, anak-anak pekerja migran Indonesia yang menetap di luar negeri di mana terdapat 13 SILN. Ketiga, anak-anak yang tidak bersekolah karena kendala akses pendidikan formal, baik akibat keharusan bekerja, keterbatasan biaya, maupun jarak rumah yang jauh dari sekolah (“Mendikdasmen RI Resmikan,” 2025).

Kemendikdasmen juga telah menyusun dokumen perencanaan program PJJ yang dituangkan dalam peta jalan pendidikan jarak jauh untuk empat tahun ke depan. Pada tahun 2025, program difokuskan pada uji terap dan pengembangan infrastruktur. Tahun 2026, PJJ akan diterapkan di 34 sekolah percontohan di 34 provinsi. Pada tahun 2027, penerapan diperluas secara bertahap ke sekolah-sekolah lainnya. Tahun 2028 difokuskan pada pengembangan sistem penilaian dan evaluasi. Selanjutnya, pada tahun 2029, akan dilakukan konsolidasi serta pengembangan lanjutan PJJ secara nasional (Muhammad, 2025).



Tantangan Penerapan PJJ di Indonesia

Merujuk pada Peta Jalan PJJ di Indonesia, pada tahun 2025 program ini akan menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam jumlah signifikan karena difokuskan pada pengembangan infrastruktur. Agar pengembangan tersebut efektif, diperlukan analisis yang matang. Dengan demikian, pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak dapat tepat sasaran dan penggunaan APBN berlangsung efisien.

Selain sistem pembelajaran, ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik maupun tenaga administrasi dalam penyelenggaraan PJJ juga perlu mendapat perhatian. Perhitungan beban kerja dan tanggung jawab administrasi harus dilakukan secara proporsional. Hal ini agar guru dan staf yang terlibat dapat menjalankannya dengan baik, serta hak-hak mereka tetap sebanding dengan beban yang ditanggung. Di samping itu, guru dan staf sekolah penyelenggara PJJ perlu memiliki keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mumpuni agar program dapat berjalan efektif.

Selain tantangan internal, terdapat juga faktor eksternal yang perlu diperhatikan pemerintah, khususnya penyediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi untuk akses internet di daerah terpencil. Kondisi geografis Indonesia yang menantang membuat hal ini sulit diatasi. Karena itu, Kemendikdasmen perlu menjalin kolaborasi dan koordinasi erat dengan para pemangku kepentingan.

Pengalaman pada masa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kebijakan subsidi paket data internet bagi siswa belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan survei di 1.700 sekolah, 43 persen responden mengeluhkan distribusi subsidi yang tidak merata. Sementara itu, 29 persen lainnya menilai subsidi tidak bermanfaat karena tidak memiliki perangkat seperti komputer, laptop, atau ponsel pintar (Pradana & Syarifuddin, 2021).

Alternatif Penerapan PJJ

Untuk meningkatkan efektivitas PJJ, pembelajaran dapat menerapkan pendekatan melalui dialog-dialog yang berkualitas. Guna meminimalkan penurunan mutu akibat keterbatasan koneksi internet, PJJ dapat dipadukan dengan metode *blended learning*. Dalam skema ini, kegiatan belajar dilaksanakan secara sinkron maupun asinkron (UNICEF, 2021).

Agar PJJ berjalan optimal, tenaga pendidik dan tenaga administrasi perlu mendapat dukungan untuk meningkatkan kompetensi pemanfaatan TIK. Platform komunikasi dan pembelajaran yang sederhana serta familiar, seperti Zoom dan WhatsApp, dapat menjadi pilihan. Sistem yang digunakan sebaiknya efisien dan tidak membutuhkan *bandwidth* besar sehingga biaya koneksi internet bagi siswa tidak memberatkan.

Selain itu, sistem pembelajaran harus mudah diakses melalui perangkat *mobile* pribadi siswa. Jika memungkinkan, perlu dilakukan diversifikasi media pembelajaran. Dengan cara ini, siswa tidak selalu bergantung pada koneksi internet. Pada akhirnya, selain



tenaga pendidik dan tenaga administrasi, siswa juga perlu mendapat pengenalan serta pelatihan dalam penggunaan sistem pembelajaran PJJ. Tugas dan asesmen yang diberikan sebaiknya dirancang sederhana agar mudah dipahami dan dikerjakan.

Uji terap PJJ pada jenjang pendidikan menengah yang diluncurkan Kemendikdasmen sejalan dengan visi Komisi X DPR RI untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan di wilayah 3T. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti banyaknya anak Indonesia di wilayah perbatasan yang kesulitan memperoleh pendidikan formal. Temuan tersebut mendorong Komisi X untuk membentuk Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Daerah Marginal.

Namun, prinsip kehati-hatian harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan PJJ. Karena itu, Kemendikdasmen perlu menyiapkan perencanaan yang matang dan berkelanjutan. Apabila program ini berhasil, pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dapat terwujud. Hal ini sekaligus menjamin pemenuhan hak atas layanan pendidikan bagi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, PJJ jenjang pendidikan menengah ini diharapkan mampu menurunkan angka ATS di Indonesia.

Penutup

Peluncuran uji terap PJJ jenjang pendidikan menengah oleh Kemendikdasmen merupakan langkah strategis untuk mengatasi masalah ATS, khususnya di wilayah 3T dan komunitas pekerja migran. Program ini memiliki target jelas dan peta jalan hingga 2029, dengan SIKK sebagai lokasi percontohan karena pengalaman dan infrastrukturnya. Kolaborasi dengan Universitas Terbuka dan SMA Negeri 2 Padalarang turut memperkuat dasar penyelenggaraan PJJ. Namun, tantangan masih ada, seperti keterbatasan jaringan, kesiapan tenaga pendidik, serta keterjangkauan perangkat dan internet, sehingga diperlukan inovasi berupa *blended learning*, asesmen sederhana, dan diversifikasi media pembelajaran.

Melalui fungsi pengawasan, Komisi X diharapkan dapat memastikan program dan alokasi anggaran PJJ disiapkan secara matang, efisien, dan sesuai kebutuhan daerah. Komisi X juga dapat memberikan masukan strategis bagi Kemendikdasmen agar implementasi PJJ sejalan dengan visi peningkatan akses dan mutu pendidikan nasional. Dengan pengawasan yang kuat dan dukungan politik yang konsisten, PJJ berpotensi menjadi instrumen efektif untuk menurunkan angka ATS dan mewujudkan pemerataan hak pendidikan.



Referensi

- Kemendikdasmen. (2025, Agustus 7). *Peluncuran uji terap penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (PJJ) jenjang pendidikan menengah* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=twylwFA_LIA
- Larasati, C. (2025, Agustus 7). Kemendikdasmen luncurkan uji terap penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh. *medcom.id*. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/GKdloz0K-kemendikdasmen-luncurkan-uji-terap-penyelenggaraan-pembelajaran-jarak-jauh>
- Muhamad, S. F. (2025, Juli 18). Kemendikdasmen siapkan skema PJJ bagi warga minim akses pendidikan. *ANTARA*. <https://www.antaranews.com/berita/4975169/kemendikdasmen-siapkan-skema-pjj-bagi-warga-minim-akses-pendidikan>
- Mendikdasmen RI resmikan peluncuran program pendidikan jarak jauh. (2025, Agustus 8). *KabarPendidikan.id*. <https://www.kabarpendidikan.id/2025/08/mendikdasmen-ri-resmikan-peluncuran.html>
- Pradana, M., & Syarifuddin, S. (2021). The struggle is real: Constraints of online education in Indonesia during the COVID-19 pandemic. *Frontiers in Education*, 6(753776), 1–2. <http://doi.org/10.3389/feduc.2021.753776>
- Rosa, N. (2025, Agustus 7). Pendidikan jarak jauh sekolah menengah diluncurkan, DPR: Perjuangan 2 dekade. *Detik Edu*. <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-8049419/pendidikan-jarak-jauh-sekolah-menengah-diluncurkan-dpr-perjuangan-2-dekade>
- UNICEF. (2021). *Situational analysis on digital learning landscape in Indonesia* [Final Report]. UNICEF.

